

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi dan Kompetensi Karyawan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren di Aceh

Nurmila Dewi¹, Ismed Wijaya², Dasmi Husin³ Rahmi Raihan⁴ Nurul Mawaddah^{5*}

^{1,3} *Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA*

¹d3wi.tania@gmail.com

^{3*}dasmihusin@pnl.ac.id (penulis korespondensi)

Abstrak— Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi dan kompetensi Karyawan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan yayasan pondok pesantren. Penelitian ini dilakukan pada enam yayasan pondok pesantren terpadu se Kota Lhokseumawe dan kabupaten Aceh Utara. Kota ini merupakan bagian dari provinsi Aceh. Dari 15 pesantren yang aktif, hanya diambil sebanyak 6 pesantren saja dengan target sampel 30 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruhnya variabel penerapan ISAK 35 dan kompetensi karyawan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pesantren. Idealnya kedua variabel independen tersebut menunjang proses penegakan akuntabilitas pesantren, namun hasil penelitian membuktikan adanya arah penolakan yang sangat jelas (koefisien negatif). Interpretasi standar akuntansi keuangan yang baru dimulai sejak 1 Januari 2020 tersebut, ternyata belum familiar di kalangan pengelola keuangan pesantren. Responden tidak mengetahui maksud dan tujuan dari standar ISAK 35 tersebut. Meskipun demikian, proses pencatatan dan pelaporan akuntansi sampai saat ini masih berjalan dengan lancar.

Kata kunci— Akuntansi, standar, pesantren.

Abstract— The purpose of this study was to determine the effect of understanding accounting standards and employee competence on the accountability of financial management of Islamic boarding schools foundations in Lhokseumawe City. This research was conducted at six integrated Islamic boarding schools in Lhokseumawe City and Aceh Utara district. Of the 15 active pesantren (religion boarding school), only 6 were taken with a target sample of 30 people. The results showed that there was no effect of the variable of ISAK 35 implementation and employee competence on the accountability of Islamic boarding school financial management. Ideally the two independent variables support the process of upholding the accountability of pesantren, but the results of the study prove that there is a very clear direction of rejection (negative coefficient). The interpretation of financial accounting standards, which have only started since January 1, 2020, is not yet familiar among Islamic boarding school financial managers. Respondents do not know the intent and purpose of the ISAK 35 standard. Nevertheless, the process of recording and reporting accounting is still running smoothly.

Keywords— Accounting, standard, religion boarding, school

I. PENDAHULUAN

Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang memberikan pelayanan sosial kepada publik. Dalam operasinya organisasi nirlaba tidak berorientasi pada pemenuhan keuntungan (provit motive). Pada umumnya organisasi nirlaba menekankan pada pelayanan yang maksimal. Salah satu bentuk organisasi nirlaba di masyarakat yang berbadan hukum adalah yayasan pondok pesantren. Perkembangan pesantren dewasa ini cukup prospektif. Keberadaan pesantren telah menjadi salah satu target pengembangan ekonomi syariah di Indonesia karena perannya cukup strategis untuk meningkatkan kemandirian ekonomi umat [1]

Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara adalah kota berkembang kedua setelah kota Banda Aceh. Kedua daerah ini memiliki jumlah penduduk yang sangat signifikan. Di daerah ini juga banyak berdiri pondok pesantren baik yang terpadu maupun tradisional salafi. Karenanya representasi pesantren sebenarnya bisa dikaji (diteliti) dari dua daerah ini. Diketahui banyak jenis haluan pesantren di Aceh, namun pada dasarnya eksistensi pesantren bertujuan untuk mendidik santri agar memahami ilmu agama dan berakhlak mulia.

Setiap pesantren memiliki sumber pendanaan yang berbeda-beda. Keberadaan pesantren telah memberikan nuansa relegi bagi masyarakat yang menarik dan dibutuhkan. Selain menawarkan ilmu agama, pesantren-pesantren juga memiliki madrasah sekolah umum tersendiri. Banyaknya sumber mata pencaharian pesantren ditengarai mampu

menggerakkan aktivitas pendanaan operasional pesantren. Belum lagi adanya kontribusi dari pihak eksternal. Semua hal itu memerlukan penanganan akuntansi dan pelaporan keuangan yang baik.

Penguasaan standar akuntansi seperti ISAK 35 dan kompetensi karyawan dibidang keuangan sangat berhubungan langsung dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan pesantren. Saat ini keahlian seperti ini sangat diperlukan yayasan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang valid dan andal.

II. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada enam pondok pesantren dalam wilayah pemerintah kota Lhokseumawe dan / atau Aceh Utara. Penelitian ini melakukan survey partisipatif. Sumber data berasal dari data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket kuisisioner kepada responden, melakukan wawancara, serta melakukan observasi terhadap penyelenggaraan keuangan yayasan pondok pesantren. Data yang telah dikumpulkan darikuisisioner di analisis menggunakan metode deskriptif. melalui media alat bantu statistik SPSS versi 19. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesantren dapat didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/ atau masyarakat. Pendiriannya dengan tujuan membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai

ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat. Meskipun lebih bersifat keagamaan, namun pondok pesantren tetap harus mengelola organisasinya dengan baik. Salah satu diantaranya adalah pengelolaan keuangan dengan menggunakan ilmu akuntansi.

Akuntansi jasa pondok pesantren memerlukan pertanggungjawaban atas pengguna laporan keuangan baik untuk masyarakat (publik) maupun untuk pemilik yayasan sendiri. Pada dasarnya kepemilikan pesantren adalah milik masyarakat, namun masyarakat tidak berhak menuntut atau meminta timbal balik atas penyertaan yang telah diberikannya. Meskipun demikian, pertanggungjawaban tetap wajib diberikan oleh pengelola pesantren kepada masyarakat. Apalagi untuk masyarakat yang telah memberikan bantuan pendanaan atau pun hibah. Kalau ada hibah dari pemerintah, tentunya pengurus yayasan wajib mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya.

Pemahaman standar akuntansi (X1) dan kompetensi karyawan (X2) ternyata tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan

Setelah mengikuti pengujian asumsi klasik, uji validitas, dan uji reabilitas diketahui bahwa penelitian tidak bermasalah. Besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y dalam analisis linear berganda dapat berpedoman pada nilai R Square atau R^2

Nilai korelasi / hubungan (R) 0,51. Sedangkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat / koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,41. Ini dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh pemahaman interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) 35 dan kompetensi karyawan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan hanya 41% saja. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Penerapan ISAK-35 baru dimulai sejak 1 Januari 2020. Sejak dari tanggal itu pesantren sudah boleh menerapkan standar akuntansi untuk entitas non laba seperti pesantren dan mesjid. Penerapan ISAK 35 sebenarnya tidak diwajibkan. Pesantren boleh mengikutinya dan boleh juga tidak. Kebanyakan pesantren yang diteliti di Lhokseumawe dan Aceh Utara tidak menerapkan ISAK 35. Dari hasil wawancara diketahui mayoritas responden tidak mengetahui atau masih asing dengan eksistensi standar akuntansi tersebut. Begitupun, pengelolaan keuangan pesantren tetap dilaksanakan seperti biasanya. Apa yang diharapkan dalam ISAK 35 sebagian besar telah dilaksanakan

Nilai a sebesar 4.095 dapat diartikan jika tidak ada penerapan ISAK 35 (X), maka nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y) adalah 4.095, sedangkan nilai b (koefisien regresi) sebesar -0,027 dan 0,014 bernilai negatif, dapat diartikan bahwa setiap penambahan 1% penerapan ISAK-35 (X), maka akuntabilitas pengelolaan keuangan pesantren (Y) akan terjadi penurunan sebesar 0,027.

Demikian halnya dengan nilai X2 kompetensi karyawan juga akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Arah koefisien bernilai negatif ditengarai tidak mengganggu pengujian regresi berganda ini. Arah koefisien tersebut

menandakan bahwa keberadaan ISAK 35 belum dikenal dan belum diterapkan di sejumlah pesantren di Lhokseumawe dan kabupaten Aceh Utara.

Jika nilai B pada constant (a) terlihat sebesar 4.095, sedangkan nilai penerapan ISAK 35 (b1) sebesar -0,27 dan b2 -0,014, maka persamaan regresinya dapat dirumuskan adalah: $Y = 4.095 - 0,27X_1 - 0,014X_2$. Dalam kondisi normal seharusnya persamaan ini berkoefisien positif dimana semakin meningkat pemahaman akuntansi, maka semakin meningkat pula akuntabilitas pengelolaan keuangan pondok pesantren. Hal ini sangat memungkinkan karena pencatatan dan pelaporan keuangan seperti yang telah direkomendasikan di ISAK 35 tidak dikenal dan tidak diterapkan sama sekali di dalam pengelolaan keuangan.

Selanjutnya pada tabel Coefficients terlihat nilai sig X1 dan X2 sebesar 0,873 dan 0,948. Nilai itu ternyata lebih besar dari probabilitas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menandakan tidak ada pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y.

Berdasarkan tabel Coefficients diketahui nilai t hitung -0,162 dan -0,66. menelisik derajat kebebasan ($df = n - 2$ atau $30 - 2$ diperoleh hasilnya 28. Dengan melihat tabel t tabel pada kolom 0,025 baris 28 sebesar 2.048, maka sudah dipastikan bahwa nilai t_{hitung} X1 dan X2 lebih kecil dari nilai t_{tabel} Dengan demikian diperoleh jawaban bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Penerapan ISAK 35 dan kompetensi karyawan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan pesantren di Lhokseumawe dan Aceh Utara.

IV. KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan sejumlah titik sampel pesantren di provinsi Aceh pada dasarnya sudah memadai, namun pemahaman standar akuntansi dan kompetensi karyawan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan terlihat masih sentralistik yang dikuasai oleh keluarga pemilik yayasan pondok pesantren. Begitupun, responden sangat menyadari pentingnya penyusunan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban kepada pemilik dan publik (masyarakat).

Determinasi dari variabel independen yang diuji terlihat jelas dalam uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruhnya variabel penerapan ISAK 35 dan kompetensi karyawan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pesantren.

Idealnya kedua variabel independen tersebut menunjang proses penegakan akuntabilitas di pesantren, namun hasil penelitian membuktikan adanya arah aksi penolakan yang bernilai (arah) negatif. Artinya, meskipun naik atau turun dua variabel x yang diuji, akuntabilitas pengelolaan keuangan yayasan pondok pesantren tetap saja belum melihat pentingnya standar akuntansi (ISAK 35) dan kompetensi kualifikasi pendidikan dan status karyawan untuk menghasilkan kinerja keuangan yayasan pondok pesantren yang lebih baik.

Hasil penelitian yang telah dilakukan tentu tidak dapat digeneralisir sepenuhnya sebagai representatif dari sejumlah pesantren yang ada di Aceh, namun setidaknya dua daerah ini

telah memberikan bagaimana nuansa deskriptif terukur dari kedua variabel independent yang diuji.

REFERENSI

- [1] Binus Bandung, 2018. Pelatihan Akuntansi Pesantren. (online). Tersedia: <http://binus.ac.id/bandung/2018/09/pelatihan-akuntansi-pesantren/>. Diakses 11 November 2019
- [2] Ikatan Akuntan Indonesia, 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- [3] Yunika Murdayanti and Dita Puruwita, 2019. Kompetensi SDM Keuangan dan Akuntabilitas Pesantren Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis. Vol. 7 No. 1, July 2019, 19-29. E-ISSN: 2548-983